



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : REFENALRIA AZWAR
2. Jabatan : KEPALA KPPN PAINAN
3. NHK : 140273

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG PANJANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.060.000.000		
2. Tanah Seluas 610 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000		
3. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH , Rp. 110.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	368.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI DELICA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
3. MOBIL, HONDA HRV 1.5 SE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA LEXI LX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.670.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.422.854.982
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.160.854.982



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.160.854.982

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.